

**PENGEMBANGAN JARINGAN KERJA MITIGASI BENCANA
KELOMPOK MASYARAKAT PENANGGULANGAN BENCANA
DESA PAGERWANGI KECAMATAN LEMBANG
KABUPATEN BANDUNG BARAT**

Setiyo Sanyoto

Panti Sosial Asuhan Anak Darussa'adah Aceh
Jl. Soekarno Hatta Lampeneureut Aceh Besar Provinsi Aceh
setiyosanyoto@yahoo.com

Abstract

This study aims to understand the disaster risk reduction through the development of networks landslide mitigation in the village of Pagerwangi. The method used in this study is a qualitative method, the design of action research (action research). Data collection techniques through the study of the documentation, in-depth interviews, observation and group discussion/ focus group discussions with key figures and administrators Community Disaster Management Group (CDMG). Examination of the validity of the data to 1) test the credibility, through: the extension of participation, triangulation, peer checking, adequacy of references. 2) Test transferability, 3) Test dependability and 4) Test Confirmability. For data analysis through data reduction, data display, and drawing conclusion.

The experiment was conducted in the village of Lembang district Pagerwangi West Bandung regency. The choice of location based on data from the Geological /PVMBG indicates that the region potentially high intermediate level of ground motion, the threat of landslides is high. The results produce a network model of disaster mitigation, characterized by the cooperation that has existed between the Village Community Disaster Management Group Pagerwangi with various parties, including the Geological Agency/ PVMBG. Results later reached an agreement of cooperation and commitment to work together with agencies/ government agencies in disaster mitigation efforts.

This research has implications for social work practice where the researcher as a social worker applying practical practices social work in developing the network of disaster mitigation in the Village Pagerwangi. Theoretical implications of this research effort to develop a network that disaster mitigation work can be done if the parties already know each other between waking and mutual trust (trust).

Keywords: development for disaster mitigation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk memahami upaya pengurangan resiko bencana tanah longsor melalui pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) di Desa Pagerwangi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif, dengan rancangan penelitian tindakan (action research). Teknik pengumpulan data melalui studi dokumentasi, wawancara mendalam, observasi dan diskusi kelompok/FGD dengan tokoh-tokoh kunci dan pengurus Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB). Pemeriksaan keabsahan data dengan 1) Uji kredibilitas, melalui: perpanjangan keikutsertaan, triangulasi, pengecekan sejawat, kecukupan referensi, 2) Uji transferability, 3) Uji dependability dan 4) Uji

confirmability. Untuk analisan data dilakukan melalui reduksi data, display data, dan menarik kesimpulan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Pemilihan lokasi berdasarkan data Badan Geologi/PVMBG menunjukkan bahwa wilayah tersebut berpotensi terjadi gerakan tanah tingkat menengah tinggi, ancaman bencana longsor cukup tinggi. Hasil penelitian menghasilkan suatu model jaringan kerja mitigasi bencana, ditandai dengan adanya kerjasama yang telah terjalin antara Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana Desa Pagerwangi dengan berbagai pihak, diantaranya dengan Badan Geologi/ PVMBG. Hasil kerjasama kemudian tercapai suatu kesepakatan dan komitmen kerjasama dengan instansi/lembaga pemerintah dalam upaya mitigasi bencana.

Penelitian ini berimplikasi terhadap praktek pekerjaan social dimana peneliti sebagai pekerja social menerapkan praktek-praktek praktis pekerjaan sosial dalam upaya pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana di Desa Pagerwangi. Implikasi teoritis dari penelitian ini bahwa upaya pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana bisa dilakukan apabila antar pihak sudah saling mengenal dan terbangun rasa saling percaya (trust).

Kata kunci: pengembangan jaringan kerja, mitigasi bencana, Kelompok Masyarakat Penganggulangan Bencana (KMPB).

Pendahuluan

Jawa Barat merupakan salah satu daerah yang sering dilanda bencana, terutama potensi bencana pergerakan tanah. Di Jawa Barat tidak ada satu pun daerah yang luput dari potensi pergerakan tanah. Dari 26 kabupaten/kota di Jawa Barat, sebanyak 21 kabupaten berpotensi besar terjadi longsor, terutama Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Garut, Tasikmalaya, Majalengka, Sukabumi, Bogor, dan Cianjur yang berada pada dataran menengah dan tinggi. Potensi kerentanan gerakan tanah beragam, mulai dari ringan, menengah, sampai tinggi. Kebanyakan bencana longsor berlangsung di daerah yang memiliki kerawanan potensi longsor menengah sampai tinggi. Bahkan, daerah yang pernah dilanda bencana longsor bisa kembali mengalami kejadian serupa. (www.linmasjabar.com, 2010). Hal itu menunjukkan betapa rentannya tanah di Jawa Barat. Frekuensi longsor di Jawa Barat lebih tinggi karena terletak di daerah vulkanik sehingga banyak terdapat titik rawan longsor. Daerah seperti itu memiliki banyak gunung berapi aktif yang membuat tanah gembur. Sedikitnya enam gunung berapi aktif terdapat di wilayah Jawa Barat, lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lain di Pulau

Jawa. Curah hujan tinggi dan banyaknya aliran sungai menambah kesuburan tanah, kendati hal itu menunjukkan kerentanan pergerakan tanah yang tinggi.

Menurut Data Badan Geologi/Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi tentang wilayah potensi gerakan tanah di Provinsi Jawa Barat bulan Juli tahun 2010 wilayah kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat termasuk daerah yang berpotensi terjadi gerakan tanah tingkat menengah-tinggi dan banjir bandang. Data lain dari Dinas Sumber Daya Energi dan Mineral Provinsi Jawa Barat tentang Peta Zona Kerentanan Gerakan Tanah Kabupaten Bandung Barat, juga menunjukkan wilayah Kecamatan Lembang, salah satunya Desa Pagerwangi masuk dalam zona menengah-tinggi.

Desa Pagerwangi merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dengan kontur wilayah berbukit-bukit, di ketinggian lebih dari 1000 m dpl, tingkat kemiringan tanah mencapai 45 derajat, serta mempunyai curah hujan yang cukup tinggi antara 7 sampai dengan 8 bulan per tahun. Suhu rata-rata harian berkisar 26-29

derajat Celcius. Luas wilayah menurut penggunaan lahan sejumlah 1985 ha, dengan kontur tanah berbukit-bukit sebagian besar relatif gundul dari tanaman keras/ pohon besar yang dapat mengikat tanah, sebagian lahan telah beralih fungsi untuk permukiman (vila), kafe dan untuk lahan pertanian, sayur sayuran, dan ditanami rumput gajah. Kondisi geografis tersebut, menjadikan Desa Pagerwangi termasuk daerah rawan longsor dengan kategori menengah tinggi.

Data penduduk berdasarkan jenis pekerjaan menunjukkan bahwa mata pencaharian dominan dari masyarakat Desa Pagerwangi adalah petani, baik sebagai petani pemilik lahan maupun penggarap atau buruh tani (75%), serta peternak, khususnya peternak sapi perah. Hal ini dipengaruhi oleh kondisi alam berbukit-bukit serta tingkat kesuburan tanah yang tinggi, juga suhu udara yang cukup sejuk/dingin sehingga menjadi daya dukung kegiatan pertanian maupun peternakan. Selain itu, faktor keterampilan dan persaingan di lapangan pekerjaan yang lain di masyarakat menjadikan penduduk memilih pekerjaan di bidang pertanian dan peternakan. Akibatnya, penggunaan lahan untuk pertanian dan peternakan semakin luas yang menyebabkan semakin berkurangnya lahan/bukit dengan tanaman/pohon yang keras, berubah menjadi lahan pertanian dan tanaman rumput untuk pakan ternak. Kondisi tersebut dapat memicu terjadinya bencana tanah longsor. Hasil asesmen pada kegiatan praktikum menunjukkan bahwa Desa Pagerwangi merupakan daerah yang rawan terjadi tanah longsor karena kontur wilayah yang berbukit-bukit dan dengan tingkat kemiringan tanah lebih dari 30 derajat.

Kejadian longsor yang cukup besar pernah terjadi di Kampung Babakan Bandung RW 10 Desa Pagerwangi, yang menimbulkan korban 2 orang meninggal pada tahun 2005. Semenjak kejadian tersebut, longsor terus terjadi, dan dari tahun ke tahun semakin meluas dan mendekati permukiman warga, jalan raya, serta mengggerus tanah/lahan pertanian warga. Hal ini dipicu oleh beberapa hal, diantaranya struktur tanah yang gembur, curah hujan yang

tinggi, kurangnya tanaman keras yang bisa mengikat tanah di lahan sekitar lokasi longsor, adanya saluran air yang bermuara di ceruk/jurang tempat longsor. Selain itu, kesadaran warga untuk menjaga lingkungan dan mencegah longsor juga masih rendah, dimana beberapa kali telah dilakukan program penghijauan di lahan-lahan kritis/gundul, namun dirasakan kurang berhasil dikarenakan kurangnya perawatan dan kepedulian warga. Dari sisi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun Desa Pagerwangi selama ini juga belum ada program yang khusus dilakukan untuk menangani /mencegah terjadinya tanah longsor.

Pengetahuan masyarakat tentang bencana tanah longsor dan penanggulangannya masih rendah. Hasil intervensi awal yang dilakukan di Desa Pagerwangi menunjukkan bahwa masalah utama yang dihadapi warga Desa Pagerwangi adalah kurangnya pengetahuan dan kemampuan warga dalam mitigasi bencana tanah longsor. Sedangkan potensi lokal yang ada yang bisa dimanfaatkan untuk mengatasi permasalahan adalah sumber daya manusia, sumberdaya alam, kelembagaan sosial ekonomi dan potensi keuangan.

Intervensi yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah program peningkatan kapasitas masyarakat. Kegiatan yang dilakukan dalam program tersebut adalah bekerja bersama masyarakat, melakukan penyuluhan kebencanaan, pelatihan kebencanaan dan pengorganisasian (Pembentukan Kelompok Penanggulangan Bencana). Peneliti dengan masyarakat melakukan pemagaran, pemasangan tanda bahaya di sekitar lokasi yang rawan longsor, serta penanaman pohon (penghijauan).

Hasil pelaksanaan program pada saat intervensiawal, diperoleh gambaran bahwa pelaksanaan program dapat dikatakan berhasil. Hal ini dapat dilihat dari adanya dukungan dari tokoh masyarakat dalam pelaksanaan program, bertambahnya pengetahuan warga tentang bencana tanah longsor, terlatihnya tenaga penanggulangan bencana, terbentuknya organisasi /kelompok masyarakat

penanggulangan bencana (KMPB), terlaksananya kegiatan pemagaran, pemasangan tanda bahaya serta penanaman pohon pada daerah yang rawan bencana. Namun, program yang telah dilakukan masih perlu dikembangkan lebih lanjut agar upaya mitigasi bencana tanah longsor bisa lebih optimal dan semakin mengurangi resiko bencana tanah longsor di Desa Pagerwangi, terutama dalam hal pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana tanah longsor dengan berbagai pihak/lembaga yang terkait dengan upaya mitigasi bencana.

Jaringan kerja mitigasi bencana Kelompok Masyarakat Penanggulangan bencana (KMPB) merupakan suatu jalinan kerjasama antara KMPB dengan lembaga/institusi lain untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pengembangan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan (*capacity*) menghadapi ancaman bencana tanah longsor.

Kondisi jaringan kerja yang telah dibangun oleh KMPB melibatkan lembaga/institusi yang ada di desa Pagerwangi, seperti Pemerintah Desa, LKMD, Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Karang Taruna, Perlindungan Masyarakat (Linmas) serta lembaga/institusi eksternal yaitu Palang Merah Indonesia (PMI) Kabupaten Bandung Barat, Dinas Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dan Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat. Kegiatan yang dilakukan antara lain melakukan pemantuan daerah yang rawan longsor, pemasangan tanda peringatan bahaya tanah longsor, serta penanaman pohon di pinggir jalan dan sekitar area/lahan yang rawan longsor, penyuluhan dan pelatihan kebencanaan.

Namun, upaya yang dilakukan tersebut dirasakan belum cukup untuk mengatasi ancaman bencana tanah longsor yang setiap saat bisa terjadi. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan kemampuan dan sumberdaya yang dimiliki oleh lembaga/institusi anggota jaringan kerjatersebut dalam memenuhi kebutuhan atau memecahkan masalah dalam upaya mitigasi bencana tanah longsor. Untuk itu perlu dilakukan pengembangan jaringan

untuk mengakses sumber-sumber dan menjalin kemitraan dengan organisasi/institusi lainnya yang terkait dengan upaya mitigasi bencana tanah longsor.

Selama ini kerja sama yang sudah ada antara lain dengan Dinas Kehutanan dalam bentuk penyediaan bibit untuk reboisasi lahan, namun dirasakan masih kurang dari sisi jumlah, serta jenis bibit pohon yang tidak sesuai dengan keinginan masyarakat, sehingga masyarakat mengharapkan adanya bantuan bibit tanaman yang lebih banyak dan sesuai dengan kebutuhan warga/ada nilai ekonomisnya. Warga siap berkontribusi dalam hal penyediaan lahan dan tenaga, serta komitmen untuk merawat. Selain itu masyarakat juga mengharapkan ada perhatian dari Dinas Pekerjaan Umum terhadap perawatan jalan terutama pembuatan tanggul/kirmir jalan, perbaikan saluran/gorong-gorong air di tepi jalan di dekat lokasi yang rawan longsor, karena ada bagian jalan/gorong-gorong yang ambrol, sering membahayakan pengguna jalan. Diharapkan ada bantuan perbaikan, masyarakat siap bergotong-royong membangun pembatas/kirmir jalan apabila disediakan bahan-bahannya oleh pemerintah. Masyarakat juga mengharapkan adanya survey atau pemetaan dari badan geologi untuk mengetahui seberapa besar potensi ancaman tanah longsor di desa Pagerwangi serta karakteristiknya, sehingga diharapkan dapat ketahui cara penanggulangannya yang paling tepat. Masyarakat melalui KMPB juga mengharapkan adanya perhatian dan pembinaan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPPD) Kabupaten Bandung Barat, bisa dalam bentuk pelatihan lanjutan tentang kesiapsiagaan bencana maupun bantuan peralatan komunikasi.

Kegiatan pengembangan jaringan sangat diperlukan karena KMPB menyadari bahwa upaya mitigasi yang telah dilakukan memerlukan dukungan dari berbagai pihak, mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki masyarakat dan

keterbatasan dalam mengakses sistem sumber yang tersedia. Upaya mitigasi bencana di Desa

Pagerwangi tidak cukup dengan kegiatan pelatihan, maupun pemagaran dan penghijauan saja, namun juga memerlukan penelitian lebih lanjut dari pihak profesional tentang upaya yang paling tepat mengurangi resiko bencana tanah longsor, perlunya dukungan dana dan kebijakan dari pihak pemerintah baik pusat dan daerah.

Berdasarkan uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat melalui KMPB dalam mengembangkan jaringan kerja mitigasi bencana dengan lembaga/institusi terkait, mengetahui dampak, kelemahan dan kekuatannya untuk menyempurnakan intervensi selanjutnya.

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: *Bagaimanakah pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat?* Selanjutnya permasalahan penelitian tersebut diperinci kedalam sub-sub permasalahan sebagai berikut: 1) Bagaimanakah jaringan kerja mitigasi bencana KMPB Desa Pagerwangi? 2) Bagaimanakah rumusan pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana tanah longsor Desa Pagerwangi? 3) Bagaimanakah implementasi pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana tanah longsor Desa Pagerwangi? 4) Bagaimanakah hasil pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana tanah longsor Desa Pagerwangi?

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memahami kebutuhan jaringan kerja mitigasi bencana KMPB Desa Pagerwangi; 2) Merumuskan pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana KMPB Desa Pagerwangi; 3) Menerapkan/mengimplementasikan pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana KMPB Desa Pagerwangi; 4) Mengetahui hasil pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana KMPB Desa Pagerwangi.

Metode Penelitian

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang meneliti pada kondisi obyek yang alamiah dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan pada makna dari pada *generalisasi* (Sugiyono: 2007).

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian tindakan (*action research*). Menurut Kemmis (1983) dalam Yatim Riyanto (1996:47) dalam Nurul Zuriah (2009:70) menyatakan bahwa penelitian tindakan merupakan upaya mengujicobakan ide-ide kedalam praktik untuk memperbaiki atau mengubah sesuatu agar memperoleh dampak nyata dari situasi. Selanjutnya Kemmis dan Taggart (1988:5-6) dalam Nurul Zuriah (2009) juga menyatakan bahwa penelitian tindakan adalah suatu bentuk penelitian reflektif diri yang secara kolektif dilakukan peneliti dalam situasi sosial untuk meningkatkan penalaran dan keadilan praktik pendidikan dan sosial mereka, serta pemahaman mereka mengenai praktik ini dan terhadap situasi tempat dilakukan praktik-praktik tersebut.

Penelitian tindakan merupakan intervensi skala kecil terhadap tindakan di dunia nyata dan pemeriksaan cermat terhadap pengaruh intervensi tersebut (Cohen dan Manton, 1980:174) dalam Nurul Zuriah (2009:70). Sementara menurut Elliot (1991:69) dalam Nurul Zuriah (2009:70) penelitian tindakan merupakan kajian tentang situasi sosial dengan maksud untuk meningkatkan kualitas kegiatan yang ada didalamnya. Seluruh prosesnya, yang meliputi telaah, diagnosis, perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan dampak, serta menjalin hubungan yang diperlukan antara evaluasi diri dan perkembangan profesional.

Berdasarkan beberapa definisi penelitian tindakan di atas, bahwa penelitian tindakan menekankan pada kegiatan (tindakan) dengan mengujicobakan suatu ide ke dalam praktik atau situasi nyata yang diharapkan kegiatan

tersebut mampu memperbaiki dan meningkatkan kualitas proses belajar.

Menurut Nurul Zuriah (2009:75) langkah-langkah atau prosedur penelitian tindakan meliputi 8 (delapan) tahapan : 1) Tahapan I: Identifikasi – evaluasi – formulasi masalah yang dipandang kritis, 2) Tahap II: Diskusi pendahuluan dan perundingan diantara kelompok yang berminat dan terlibat yang berakhir dengan suatu draf usulan dan persoalan-persoalan yang perlu dijawab, 3) Tahap III: Kajian pustaka, jurnal penelitian yang relevan dengan sasaran, prosedur, dan masalahnya, 4) Tahap IV: Modifikasi atau redefinisi rumusan awal masalah, 5) Tahap V: pemilihan prosedur penelitian, penetapan sampel, administrasi penelitian dan tindakannya, pemilihan bahan, alokasi sumber daya dan tenaga, 6) Tahap VI: Pemilihan prosedur evaluasi, melaksanakan prinsip kontinuitas, dan menetapkan penelitian tindakan, 7) Tahap VII: Melaksanakan proyek penelitian tindakan, 8) Tahap VIII: Pemaknaan data, penarikan inferensi dan penilaian seluruh proyek penelitian. Diskusi penemuannya berdasarkan kriteria yang telah disetujui.

Pada penelitian ini sumber data utama adalah informan yang telah ditetapkan, yaitu para pengurus Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB), serta aparat pemerintahan desa, karena mereka yang mengetahui, memahami, merasakan dan melaksanakan proses pengembangan jaringan mitigasi bencana KMPB. Jumlah partisipan sebanyak 9 orang dengan karakteristik sebagai ketua KMPB, ketua regu deteksi dini, regu pemetaan, regu keamanan dan pengungsian, regu komunikasi regu pertolongan pertama dan dapur umum, perangkat desa Pagerwangi.

Jenis data yang dikumpulkan dalam penelitian ini berupa data kualitatif, yaitu data yang berasal dari pengalaman, pikiran, sikap dan keyakinan orang yang dikumpulkan melalui penelaahan peneliti atas hasil observasi, wawancara, studi dokumentasi dan diskusi kelompok terfokus. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah: 1) Sumber data primer, yaitu data yang langsung

diperoleh peneliti di lapangan dari informan penelitian, yaitu pengurus KMPB (Ketua dan 5 kepalaregu) di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat; 2) Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari perangkat desa Pagerwangi.

Penggumpulan data menggunakan teknik: 1) Studi Dokumentasi yaitu pengumpulan data dengan cara mempelajari data geografis, demografis, sistem sosial budaya, ekonomi serta sumber dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat dan KMPB Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat; 2) Observasi, yaitu teknik melalui pengamatan langsung terhadap obyek-obyek tertentu yang terkait dengan pengumpulan data tentang permasalahan yang diteliti. Untuk mendapatkan data yang diinginkan, peneliti melakukannya dengan mengamati langsung kondisi dan mengikuti kegiatan yang dilakukan masyarakat terutama aktivitas KMPB dalam upaya mitigasi bencana; 3) Wawancara, yaitu mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada informan untuk menggali dan mendapatkan informasi yang lebih mendalam tentang pemahaman dan kebutuhan masyarakat / KMPB dalam upaya menjangkau dan mengembangkan jaringan mitigasi bencana tanah longsor. Wawancara ini dapat dilakukan secara perorangan kepada warga masyarakat atau pada KMPB untuk mendapatkan informasi secara lebih detail dan akurat; 4) Diskusi Kelompok Terfokus (FGD), yaitu kegiatan pertemuan yang dilakukan antara peneliti dengan anggota KMPB dan berbagai unsur masyarakat untuk membahas berbagai isu atau berbagai persoalan yang berkembang yang terkait dengan permasalahan atau obyek penelitian, diskusi ini dilakukan secara partisipatif.

Analisis data yang digunakan mengikuti model yang disampaikan oleh Miles dan Huberman seperti dikutip oleh Sugiyono (2007), yakni melalui: 1) Reduksi data, dilakukan dengan mengelompokkan data yang terkumpul berdasarkan kategori-kategori tertentu. Tahap ini juga biasa dikenal dengan tahap kategorisasi data. Data yang dikumpulkan kemudian dikelompokkan, dikaji

dan dibuat kategorinya, atas data yang berulang/sama atau berlebihan dilakukan pengurangan (reduksi). Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan; 2) *Display* data, merupakan tahap penyajian data yang dilakukan untuk mencari hubungan antara kategori-kategori sehingga terbentuk suatu pola tertentu. Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, diagram alur (*flowchart*), dan sejenisnya. *Display* yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data maka akan mempermudah untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahamitersebut; 3) Kesimpulan, merupakan kegiatan menarik kesimpulan dari adanya pola-pola hubungan, sehingga ditemukan jawaban terhadap permasalahan penelitian. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel. Dengan demikian kesimpulan mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena seperti telah dikemukakan bahwa masalah dan rumusan masalah masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah penelitian berada di lapangan.

Hasil dan Pembahasan

Desa Pagerwangi merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat. Sebagian besar wilayah desa berkontur tanah berbukit-bukit, dengan ketinggian lebih dari 1000 meter di

atas permukaan laut. Suhu yang cukup dingin membuat daerah ini cocok untuk bertanam sayur-sayuran seperti tomat, kentang, cabe, brokoli, labu siam, dan lain-lain. Desa Pagerwangi berjarak tempuh dari ibukota propinsi sejauh 17 km, dari ibukota kabupaten sejauh 29 km, dan dari ibukota kecamatan sejauh 4 km.

Luas wilayah Desa Pagerwangi menurut penggunaan lahan sejumlah 1985 ha, dengan kontur tanah berbukit-bukit sebagian besar relatif gundul dari tanaman keras/ pohon besar yang dapat mengikat tanah, Sebagian lahan telah beralih fungsi untuk permukiman (vila), kafe dan untuk lahan pertanian, sayur-sayuran, ditanami rumput gajah, tingkat kemiringan tanah mencapai 45 derajat, serta mempunyai curah hujan yang cukup tinggi antara 7 s/d 8 bulan per tahun., suhu rata-rata harian berkisar 26-29 derajat Celcius. Dengan kondisi geografis tersebut, menjadikan Desa Pagerwangi termasuk daerah rawan longsor dengan kategori menengah tinggi, sesuai data yang dikeluarkan oleh Badan Meteorologi, Vulkanologi dan Geofisika.

Dari hasil interview, diskusi dengan berbagai pihak di Desa Pagerwangi, studi dokumentasi, observasi lapangan dan *transek walk* yang dilakukan peneliti bersama beberapa warga dan aparat pemerintah desa, Desa Pagerwangi dengan kontur wilayah yang berbukit-bukit dan dengan tingkat kemiringan tanah lebih dari 30 derajat, merupakan daerah yang rawan terjadi tanah longsor. Lokasi yang dikategorikan rawan longsor tersebar di wilayah RW 10, RW 04, RW 06 dan RW 13.

Kejadian longsor yang cukup besar pernah terjadi di Kampung Babakan Bandung RW 10, dimana menimbulkan korban 2 orang meninggal pada tahun 2005. Di RW 10 terdapat 125 KK dengan total penduduk kurang lebih 400 jiwa, terdiri dari 100 rumah/tempat tinggal. Sebagian besar warga bekerja sebagai petani penggarap dan pengrajin kecimpring.

Semenjak kejadian tersebut, longsor terus terjadi, dan dari tahun ke tahun semakin

meluas dan mendekati permukiman warga, jalan raya, serta menggerus tanah/lahan pertanian warga. Hal ini dipicu oleh beberapa hal, diantaranya struktur tanah yang gembur, curah hujan yang tinggi, kurangnya tanaman keras yang bisa mengikat tanah di lahan sekitar lokasi longsoran, adanya saluran air yang bermuara di ceruk/jurang tempat longsoran. Selain itu, kesadaran warga untuk menjaga lingkungan dan mencegah longsor juga masih rendah, dimana beberapa kali telah dilakukan program penghijauan di lahan-lahan kritis/gundul, namun dirasakan kurang berhasil dikarenakan kurangnya perawatan dan kepedulian warga.

Dari sisi pemerintah, baik pemerintah daerah maupun Desa Pagerwangi selama ini juga belum ada program yang khusus dilakukan untuk menangani /mencegah terjadinya tanah longsor. Pengetahuan masyarakat tentang bencana tanah longsor dan penanggulangnya masih rendah. Di masyarakat Desa Pagerwangi juga ada satu mitos/cerita tentang Mundinglaya, dimana diceritakan sang mundinglaya sedang membuat jalan I melalui kawasan Kampung Babakan Bandung untuk bisa bertemu dengan sang kekasih di Situ Umar di desa Lembang. Berdasarkan mitos tersebut, lokasi longsoran di kampung Babakan Bandung merupakan jalan bagi sang mundinglaya untuk bisa sampai ke Situ Umar, sehingga longsoran akan terus terjadi dan mengarah ke permukiman warga. Mitos ini setidaknya membuat sebagian masyarakat cenderung pasrah dan menerima kejadian tanah longsor tersebut.

Sebelum penelitian dilaksanakan, masyarakat Desa Pagerwangi sudah melaksanakan *"Program Mitigasi Bencana Tanah Longsor melalui Kegiatan Peningkatan Kapasitas Masyarakat di Kampung Babakan Bandung Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat"*, dengan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: Penyuluhan kebencanaan, Pembentukan Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) Kampung Babakan Bandung, Pemasangan tanda bahaya, pemagaran dan penghijauan lahan kritis, pemagaran di sekitar

area rawan longsor, dan penghijauan lahan kritis.

Program ini berjalan selama 4 Bulan dari Bulan Agustus 2010 sampai dengan November 2010. Sasaran program adalah masyarakat desa Pagerwangi khususnya Kampung Babakan Bandung, yang mendapatkan manfaat secara langsung dari program/kegiatan yang dilakukan, tokoh masyarakat, tokoh agama, Kelompok Tani, Karang Taruna, PKK, Linmas, ketua RW/RT dan aparat desa.

Pelaksanaan program ini dilakukan oleh Tim Kerja Masyarakat yang sudah terbentuk, terdiri dari satu ketua tim dan 7 orang anggota. Lokasi pelaksanaan program dilaksanakan di RW 10 Kampung Babakan Bandung, sebagai daerah yang paling sering terjadi tanah longsor. Setelah proses asesmen dan perencanaan intervensi dilakukan, maka program dapat dilakukan dengan berbagai kegiatan, yaitu: penyuluhan kebencanaan (melalui penyampaian materi tentang pengertian bahaya tanah longsor, pengertian, tanda-tanda terjadi longsor, faktor penyebab, serta upaya penanggulangannya, gambaran kondisi wilayah desa Pagerwangi yang masuk daerah rawan longsor, penyebaran leaflet, pemutaran film bencana dan film gladi posko), Pembentukan Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) Kampung Babakan Bandung, Pemasangan tanda bahaya dan pemagaran di sekitar area rawan longsor, penghijauan lahan kritis, Pelatihan kebencanaan/ kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana serta simulasi penanganan kejadian bencana (gladi posko).

Rangkaian kegiatan tersebut dapat terlaksana dengan bantuan berbagai pihak diantaranya Dinas Sosial KBB (bantuan bahan logistik berupa beras, mie instan, ikan kaleng), PMI KBB yang memfasilitasi pelatihan kebencanaan dan gladi posko, bantuan dana dari tokoh masyarakat setempat, bibit pohon dari Gapoktan, bambu dan bibit pohon cepbreg dari warga masyarakat. Kegiatan ini bukannya tanpa hambatan, beberapa RW kemudian tidak banyak melibatkan diri,

dengan alasan kesibukan sehari-hari. Kondisi ini disiasati dengan menyiapkan pengganti yang mewakili dari RW bersangkutan. Kemudian informasi mengenai pelaksanaan rangkaian kegiatan tersebut kemudian cepat tersebar, sehingga banyak warga yang mengaku menyesal tidak sempat terlibat didalamnya. Mereka mengharapkan adanya kegiatan serupa di wilayah masing-masing serta adanya upaya lanjutan dari model awal ini. Hasil refleksi menunjukkan harapan dan keinginan tersebut, tumbuhnya keinginan untuk dapat berbuat lebih banyak dan mengakses sistem sumber seperti yang dilakukan oleh tim kerja. Pada kesempatan itu pula peneliti meyakinkan serta menunjukkan bukti bahwa banyak sumber baik dari dalam dan luar yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan kesiap-siagaan terhadap bahaya, asalkan masyarakat mau berbuat dan berpartisipasi. Lebih lanjut peneliti menyampaikan bahwa program akan berlanjut dalam konteks penelitian dan mengharapkan adanya dukungan yang konsisten dari warga.

Jaringan kerja mitigasi bencana KMPB desa Pagerwangi selama ini dilakukan dengan menjalin kerjasama dengan berbagai pihak, diantaranya PMI KBB, Dinas Sosial Bandung Barat, TNI/Polri, Pemdes, LKMD, Linmas, Karang Taruna. Hasilnya yang cukup baik, diantaranya dengan terlaksananya berbagai kegiatan seperti penyuluhan kebencanaan, peng-hijauan di lahan rawan longsor, pelatihan kebencanaan, pemasangan tanda bahaya, pemagaran di sekitar lokasi yang rawan longsor, pembuatan tembok penahan tanah di lokasi rawan longsor. Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan lebih kearah peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang pengurangan resiko bencana, namun belum bisa mencegah terjadinya longsor, sedangkan dalam kenyataannya ancaman longsor masih terus terjadi, terutama di wilayah RW 10 Kampung Babakan Bandung.

Pengembangan jaringan kerja perlu dilakukan karena KMPB sebagai organisasi komunitas belum mampu memenuhi semua kebutuhan atau memecahkan masalahnya sendiri,

sehingga perlu mengakses sumber-sumber dan menjalin kemitraan dengan organisasi-organisasi lainnya. Setiap lembaga/organisasi memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, kelebihan itulah yang dapat dimanfaatkan untuk membantu atau mengatasi kekurangan lembaga/institusi lainnya, demikian juga sebaliknya. Tujuan dilakukannya pengembangan agar lembaga atau organisasi tersebut dapat mengkombinasikan fungsi-fungsi yang diperlukan bagi pemenuhan kebutuhan dan penyelesaian masalah komunitas melalui pertukaran informasi, pengalaman, pengetahuan serta penyediaan sumber-sumber yang berasal dari dalam maupun dari luar komunitas sehingga dapat meningkatkan keberdayaan organisasi.

Berdasarkan hasil refleksi yang dilakukan bersama-sama masyarakat maka disepakati perlunya upaya mitigasi bencana lanjutan, diantaranya pemeriksaan gerakan tanah, penanaman bibit pohon, pembuatan tanggul penahan tanah, penataan saluran air. Upaya mitigasi lanjutan tersebut tentunya memerlukan dukungan dari pihak-pihak lain yang mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan kegiatannya, sehingga KMPB harus memperluas dan memperkuat jaringan kerja yang telah dibangun.

Mengacu pada hasil FGD sebagai kesimpulan refleksi, beberapa hal yang menjadi perhatian/fokus penanggulangan bencana longsor memerlukan dukungan dan kerjasama dengan berbagai instansi/lembaga lain, diantaranya pihak Badan Geologi, BPBD, Dinas Kehutanan, dsb. Hal ini mengingat keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat, yaitu keterbatasan pengetahuan, sumber daya manusia (ahli bencana), maupun biaya.

Kegiatan yang dilakukan didasarkan atas refleksi akhir dari pelaksanaan model intervensi awal, dimana diperoleh kesimpulan bahwa upaya mitigasi bencana yang sudah dilakukan dapat meningkatkan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko

bencana, dalam bentuk peningkatan pengetahuan tentang kebencanaan, meningkatnya keterampilan masyarakat dalam penanggulangan bencana melalui pelatihan dan simulasi bencana, terbentuknya KMPB, pemasangan tanda peringatan bahaya tanah longsor, penghijauan lahan kritis. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam model intervensi awal bisa terlaksana karena adanya kerjasama antara warga masyarakat melalui KMPB dengan berbagai lembaga, yaitu Palang Merah Indonesia, Profesional/Praktikan, Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Pemerintah Desa, LKMD, Gapoktan dan Linmas desa Pagerwangi. Lembaga-lembaga tersebut merupakan anggota Jaringan kerja mitigasi bencana dan berkomitmen untuk melakukan upaya pengurangan bencana di desa Pagerwangi.

Upaya pengurangan resiko bencana atau dikenal dengan istilah mitigasi merupakan berbagai tindakan yang dilakukan sebelum bencana terjadi. Dalam UU RI No 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, pada pasal 1 disebutkan bahwa "mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan (*capacity*) menghadapi ancaman bencana". Upaya-upaya mitigasi bencana merupakan tanggung jawab pemerintah, pihak terkait dan masyarakat sesuai dengan perannya masing-masing. Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan tanggungjawab dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah (UU PB No 24 Tahun 2007 pasal 5), yang meliputi: Pengurangan risiko bencana dan pemanduan pengurangan risiko bencana dengan program pembangunan, perlindungan masyarakat dari dampak bencana, penjaminan pemenuhan hak masyarakat dan pengungsi yang terkena bencana secara adil dan sesuai dengan standar pelayanan minimum, pemulihan kondisi dari dampak bencana, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam APBN yang memadai, pengalokasian anggaran penanggulangan bencana dalam bentuk dana siap pakai dan pemeliharaan arsip/dokumen

otentik dan kredibel dari ancaman dan dampak bencana.

Upaya mitigasi bencana terdiri dari beberapa tahap yang setiap tahap memiliki tujuan dan saling terkait satu dengan yang lainnya. Tahap-tahap mitigasi bencana tanah longsor menurut Erwan Nugraha (2010) yang umumnya dilakukan pemerintah atau pihak terkait (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi), antara lain: 1) Survei dan Pemetaan, merupakan tahap pertama dalam mitigasi bencana tanah longsor. Pemetaan ini bertujuan untuk menyajikan informasi visual tentang tingkat kerawanan bencana di suatu wilayah tertentu. Hasil dari kegiatan pemetaan ini dapat digunakan untuk memberikan masukan kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten/Kota dan Provinsi sebagai dasar untuk melakukan pembangunan wilayah agar terhindar dari bencana alam tanah longsor atau bencana alam geologi lainnya. Data atau informasi yang diperoleh dari survey atau pemetaan nantinya diperlukan bagi tindakan mitigasi pada tahap selanjutnya; 2) Penyelidikan, merupakan tahap mitigasi selanjutnya setelah didapat informasi dari hasil survey dan pemetaan. Dalam kegiatan penyelidikan dipelajari penyebab dan dampak bencana tanah longsor yang pernah terjadi di suatu wilayah. Data dari hasil penyelidikan ini nantinya, dapat digunakan dalam perencanaan penanggulangan bencana dan rencana pengembangan wilayah; 3) Pemeriksaan, bertujuan untuk mempelajari penyebab, proses terjadi dan kondisi bencana di kawasan tertentu yang dilanda bencana tanah longsor. Hasil pemeriksaan dapat digunakan dalam perencanaan penanggulang-an bencana dan rencana pengembangan wilayah; 4) Pemantauan, dilakukan di daerah rawah bencana tanah longsor, bertujuan untuk mengetahui secara dini tingkat bahaya tanah longsor di daerah tersebut. Hasil dari pemantauan diinformasikan pada pengguna dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah tersebut agar selalu waspada dan melakukan berbagai persiapan sedini mungkin jika sewaktu-waktu terjadi bencana; 5) Sosialisasi, bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang

bencana alam tanah longsor dan akibat yang ditimbulkannya. Sosialisasi dilakukan dengan berbagai cara, antara lain mengirimkan poster, booklet, leaflet, atau secara langsung kepada masyarakat dan aparat pemerintah.

Masih rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap mitigasi bencana. Meliputi masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap upaya pengurangan resiko bencana serta kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana. Secara rinci masalah yang dihadapi antara lain : (1) Keterbatasan jaringan kerja yang efektif dalam penyebaran informasi kebencanaan kepada masyarakat; (2) Belum terintegrasi-nya pengurangan resiko bencana dalam perencanaan pembangunan secara efektif dan komprehensif; Selanjutnya potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bandung Barat dalam menghadapi mitigasi bencana di Pagerwangi.

Berkaitan dengan implementasi pengembangan jaringan kerja mitigasi maka arah penanganannya dilaksanakan dengan memadukan upaya-upaya penanganan dan pengurangan resiko bencana secara komprehensif dan sistematis dengan didukung oleh suatu komitmen yang kuat dari semua pihak (*stakeholders*). Selain itu diharapkan pula mampu mensinergikan kapasitas penanganan dan pengurangan resiko bencana baik ditingkat pemerintahan pusat, daerah, hingga lapisan-lapisan pada masyarakat. Sehingga secara substansial merupakan perwujudan upaya yang sistematis dalam menanggulangi dampak dan mengurangi resiko bencana secara komprehensif melalui satu rencana strategis yang tersusun sistemik dalam menampung kebijakan, strategi, program, dan kegiatan yang komprehensif serta terpadu guna menjadi patokan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana.

Sebagai arah dan acuan bagi seluruh komponen pelaku pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha dalam mewujudkan pembangunan daerah yang terkoordinasi dan

berkesinambungan. Program jaringan kerja yang telah direncanakan mempunyai landasan langkah-langkah mitigasi yang jelas. Pengurangan resiko bencana sebagai konsep perencanaan yang menyeluruh (holistik), baik pada kondisi pra bencana, saat bencana maupun pasca bencana, diharapkan dapat mewarnai secara nyata dalam rencana pembangunan. Hal ini berkaitan dengan kenyataan bahwa mitigasi bencana yang tidak terencana berpotensi menimbulkan bencana. Untuk itu, perencanaan miti yang berperspektif dan terintegrasi dengan konsep pengurangan resiko bencana mutlak dilakukan, baik pada program wajib maupun pilihan. Pemaduan kegiatan pengurangan resiko bencana dalam rencana pembangunan dilakukan melalui koordinasi, integrasi dan sinkronisasi unsur-unsur penanggulangan bencana kedalam rencana pembangunan daerah.

Untuk mewujudkan sinergitas dalam pencapaian sasaran pengurangan resiko bencana, maka dalam pelaksanaan program perlu penguatan peran (partisipasi) dan komitmen dari seluruh komponen. Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan, masing-masing komponen diharapkan dapat mengambil peran sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi serta tanggung jawab dalam rangka mewujudkan masyarakat Desa Pagerwangi yang tahan dan tangguh terhadap bencana.

Hasil pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana KMPB yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak terkait sesuai tahapan dan hasil-hasilnya antara lain: Melakukan survey dan pemetaan di kawasan yang rentan, memasang rambu-rambu tanda bahaya di wilayah rawan longsor, membuat peraturan tata guna lahan, menggalakkan program penghijauan (reboisasi), melakukan perbaikan berbagai sarana dikawasan rawan longsor seperti perbaikan drainase tanah, membangun beton-beton penahan tembok, membangun sistem pengairan untuk mengurangi erosi air dan menjaga kestabilan tanah. Pekerjaan-pekerjaan ini merupakan tanggung jawab pemerintah karena membutuhkan dana yang

tidak sedikit dan membutuhkan tenaga-tenaga terampil di bidang teknik dan geologi.

Tindakan-tindakan mitigasi yang dapat dilakukan masyarakat antara lain: 1) Membuat terasering (sengkedan) pada lahan yang curam; 2) Menutup retakan tanah; 3) Menjaga kelestarian hutan dengan tidak menebang pohon sembarangan; 4) Melakukan penanaman tumbuh-tumbuhan berakar kuat; 5) Membuat saluran air hujan; 6) Membangun dinding penahan di lereng-lereng yang terjal; 7) Memeriksa keadaan tanah secara berkala.

Manfaat langsung atau hasil dari pelaksanaan program yang bisa dirasakan oleh masyarakat adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran warga serta ketrampilan dalam upaya pengurangan resiko bencana khususnya bencana tanah longsor di lingkungan mereka, terbentuknya Kelompok Masyarakat Penanggulangan Bencana (KMPB) sebagai wadah masyarakat dalam mengorganisir upaya penanggulangan bencana, keselamatan jiwa warga masyarakat lebih terjaga dan semakin berkurangnya resiko warga menjadi korban bencana tanah longsor dengan telah terpasangnya tanda peringatan bahaya dan pemagaran di sekitar daerah atau lahan yang rawan longsor, serta tertanamnya pohon-pohon sebagai upaya reboisasi lahan gundul yang rawan longsor untuk mencegah meluasnya areal lahan yang rawan longsor.

Setelah program mitigasi bencana tanah longsor melalui kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat terlaksana, maka dilakukan tahapan evaluasi dan refleksi dari pelaksanaan model intervensi awal tersebut, yang menghasilkan pemahaman dan kebutuhan untuk menjaga keberlanjutan upaya mitigasi bencana oleh masyarakat untuk mengurangi resiko bencana maupun mencegah terjadinya bencana tanah longsor. Upaya mitigasi bencana lanjutan tersebut diantaranya pemeriksaan gerakan tanah, penanaman bibit pohon, pembuatan tanggul atau beton penahan tanah, penataan saluran air. Dengan segala keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh masyarakat baik tenaga, dana, maupun sumber

daya manusia (tenaga ahli bencana), maka upaya mitigasi bencana tersebut tentunya sangat membutuhkan dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak yang mempunyai kapasitas dalam pelaksanaan kegiatan mitigasi bencana tersebut.

Implikasi penerapan model pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana secara ringkas dapat dijabarkan sebagai berikut: 1) Aplikasi model intervensi awal telah memberikan manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat, dimana telah dapat menumbuhkan kesadaran dan kepedulian akan kondisi mereka yang tinggal di daerah rawan bencana khususnya bencana tanah longsor. Dengan adanya kesadaran dan kepedulian ini diharapkan dapat memacu masyarakat untuk terus waspada dan ikut berperan aktif dalam upaya-upaya mitigasi bencana lanjutan dalam rangka pengurangan resiko bencana maupun upaya pencegahannya; 2) Upaya pengurangan resiko bencana melalui pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana merupakan salah satu langkah yang penting dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat, mengingat adanya keterbatasan kemampuan dan sumber daya yang ada. Pengembangan jaringan mitigasi bencana diharapkan bisa menjadi media untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan mempertemukannya dengan sistem sumber yang tersedia baik pihak pemerintah maupun lembaga atau institusi lainnya yang peduli dengan upaya penanggulangan bencana; 3) Pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana ini dapat memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak, baik pihak masyarakat maupun pihak pemerintah, dengan catatan ada rasa saling percaya diantara keduanya. Dengan terjalinnya kerja sama diharapkan upaya mitigasi bencana dan rangkaian kegiatannya dapat terlaksana yang bisa memberikan manfaat langsung bagi masyarakat, dimana resiko bencana di desa Pagerwangi bisa berkurang, sehingga kerugian yang lebih besar akibat bencana bisa dicegah. Sementara bagi pihak pemerintah dengan adanya partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung program-program pemerintah tentunya akan semakin mendorong kesuksesan program dan akan meringankan beban pemerintah secara umum

dalam konteks penanggulangan bencana secara keseluruhan; 4) Jaringan kerja yang sudah terjalin harus bisa dipertahankan keberlanjutannya, dengan peran aktif dari masyarakat melalui wadah KMPB maupun pemerintah desa dengan pihak terkait, agar tidak tergantung kepada agen perubahan (pekerja sosial) yang selama ini membantu memfasilitasi kegiatan yang dilakukan. Dukungan dan keterlibatan dari seluruh unsur warga masyarakat dalam setiap upaya pengurangan resiko bencana sangat penting dalam menjamin kesuksesan setiap kegiatan.

Simpulan

Penelitian *action research* yang dilakukan mengenai Model Pengembangan Jaringan Kerja Mitigasi Bencana di Desa Pagerwangi Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat yang dilaksanakan bagian dari penyempurnaan model awal pada kegiatan praktikum dalam program mitigasi bencana tanah longsor melalui kegiatan peningkatan

kapasitas masyarakat dirasa berhasil, dibuktikan dengan dukungan masyarakat/lembaga ketika melakukan kegiatan intervensi/ mitigasi bencana.

Hasil dari penerapan model pengembangan jaringan kerja mitigasi bencana ini adalah sudah terlaksananya kegiatan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Masyarakat melalui KMPB desa Pagerwangi mendapat pengetahuan tentang upaya pengurangan resiko bencana, serta dapat mengembangkan jaringan dengan menjalin kerjasama dengan lembaga pemerintah terkait, seperti Badan Geologi PVMBG dan BPBD Kabupaten Bandung Barat. Pihak Badan Geologi PVMBG memberikan apresiasi dan dukungan atas upaya pengembangan jaringan mitigasi bencana yang dilakukan oleh tim, dan bersedia untuk bekerja sama dengan masyarakat, seperti melakukan sosialisasi penanggulangan bencana serta melakukan pemeriksaan gerakan tanah di lokasi yang rawan longsor sesuai permintaan warga.

Daftar Pustaka

- BNPB. 2010. *Rencana Aksi Nasional Penanggulangan Bencana 2010- 2011*. Jakarta.
- Dede Kuswanda, dkk. 2009. *Strategi Pengurangan Resiko Bencana*. Cetakan Pertama. Bandung: STKSPress.
- Erwan Nugraha. 2010. *Tanggap Bencana Alam Tanah Longsor*. Bandung: Penerbit Angkasa.
- Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia/MPBI 2004. *Model Pedoman Umum Penanggulangan Bencana*. Jakarta: Grasindo.
- Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia/MPBI 2009. *Kiat Tepat Mengurangi Risiko Bencana - Pengelolaan Risiko Bencana Berbasis Komunitas (PRBBK)*. Jakarta: Grasindo.
- Nurul Zuriah. 2009. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Paripurno, E.T. 2007. *Penerapan PRA dalam Penanggulangan Bencana*. Yogyakarta: Kappala Indonesia-Pusat Studi Manajemen Bencana UPN Yogyakarta
- Sugiyono. 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfa Beta.

Sumber Lain:

- Eko Teguh Paripurno. 2008. *Proses Peredaman Risiko Bencana Oleh Komunitas*. Pusat Studi Manajemen Bencana, UPN Yogyakarta. paripurno.blog.upnvk.acid/2010/04/03/3/4